

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini dipaparkan penelitian terdahulu yang menurut peneliti dianggap memiliki relevansi dengan penelitian saat ini. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut.

1. Nur'ainy, dkk. (2013)

Penelitian bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah tingkat Kota di Jawa Barat. Populasi penelitian adalah pemerintah daerah seluruh Indonesia. Sampel penelitian adalah Kota yang ada di Jawa Barat. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *convenience sampling*. Data sekunder penelitian ini bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kota di Jawa Barat tahun 2008-2010, yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan penggunaan data penelitian terbebas dari BLUE. Untuk menguji hipotesis digunakan uji t dan uji F, serta uji determinasi (R^2). Hasil penelitian membuktikan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan dua faktor yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

2. Tahar & Zakhya (2011)

Tujuan penelitian ini adalah untuk memverifikasi, pertama apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kecukupan daerah, dan apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap kemandirian daerah. Kedua, apakah Pendapatan Pemerintah

Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang didukung oleh kemandirian daerah akan memberikan pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode *purposive sampling*, dengan jumlah sampel sebanyak 36 kabupaten / kota setiap tahunnya dari 56 kabupaten/kota yang ada di Pulau Kalimantan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2003 sampai tahun 2008. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id). Data yang dianalisis disusun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aktual Konsolidasi (APBD) dan Data Tingkat Pertumbuhan (PDRB). Dari hasil penelitian diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap kemandirian daerah. Sedangkan Pendapatan Pemerintah Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang didukung oleh kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Siregar & Pratiwi (2017)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari ukuran, umur, status, jumlah penduduk, jumlah satuan kerja (SKPD), belanja pegawai dan leverage terhadap kemandirian keuangan daerah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten atau kota di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 1003 laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten atau kota di Indonesia dari tahun 2009 hingga 2013. Sampel dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran, umur, status, jumlah penduduk, jumlah SKPD, dan leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Pengeluaran pegawai berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemandirian finansial daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

4. Kustianingsih & Kahar (2018)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh simultan dan partial terhadap pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian kabupaten / kota di provinsi sulawesi tengah. Sampel terdiri dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang dipilih melalui metode *purposive sampling*. Metode penelitian bersifat deskriptif verifikatif dan dianalisis dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum secara simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kemandirian kabupaten / kota di Provinsi Sulawesi Tengah; Secara parsial, pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kemandirian kabupaten / kota di Provinsi Sulawesi Tengah; Secara parsial, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemandirian kabupaten / kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

5. Gaghana, dkk. (2018)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Sulawesi Utara melalui penelitian pada empat Kota di Sulawesi Utara yakni Kota Manado, Tomohon, Bitung dan Kotamobagu. Data yang digunakan adalah data sekunder time series dan cross sectional dalam bentuk panel data tahun 2007-2016. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Sulawesi Utara.

6. Suarjana, dkk. (2019)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian finansial pada daerah di Provinsi Bali, menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian finansial pada daerah di Provinsi Bali, menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi. dan pendapatan asli daerah atas kemandirian finansial pada daerah- daerah di Provinsi Bali, serta menganalisis kemandirian keuangan masing- masing daerah di Provinsi Bali. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* selama 5 (lima) tahun terakhir dari masing- masing daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian finansial daerah di Provinsi Bali. Hasil kedua menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian finansial daerah di Provinsi Bali. Temuan ketiga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian finansial daerah di Provinsi Bali. Secara umum kemandirian finansial setiap daerah di Provinsi Bali masih bergantung pada pemerintah pusat. Studi tersebut menyimpulkan dari rendahnya rasio kemandirian finansial kabupaten/kota. Hanya daerah Badung yang memiliki rasio kemandirian finansial yang tinggi sehingga Daerah Pendapatan Asli Daerah Badung mampu membiayai pengeluarannya sendiri dalam menjalankan tugasnya melaksanakan otonomi daerah.

7. Handayani & Erinos (2020)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Barat dengan pengambilan sampel dengan metode yaitu total sampling, sehingga diperoleh sampel 12 kabupaten dan 7 kota di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi berganda dan uji residual untuk uji moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah

berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, meskipun pengaruhnya hanya sebesar 8,1%. Belanja modal tidak mempengaruhi kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah dan belanja modal dengan kemandirian keuangan daerah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan

”Teori Stewardship mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik” (Raharjo, 2007 : 39). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, menurut Murwaningsari (2009 : 31), “Teori stewardship berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas”.

Pemerintah selaku steward dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku principal pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (steward) dan rakyat (principal) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik). Sehingga dapat diterapkan dalam model kasus organisasi sektor publik dengan teori stewardship. Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah.

2.2.2 Keuangan Daerah

Menurut Pasal 1, ayat 5 dari PP No. 58/ 2005 menyatakan: “Keuangan daerah secara umum diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

Lebih lanjut, Pasal 1, ayat (7) pengelolaan Keuangan Daerah diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam konteks yang lebih sempit pada dasarnya adalah pengelolaan terhadap APBD yang dilakukan setiap tahun sekali oleh daerah, baik oleh pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/ Kota.

2.2.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber daya penerimaan yang harus dipacu pertumbuhannya secara berkesinambungan. Komponen yang berkaitan dengan itu harus ditindak lanjuti agar berhasil. Misalnya dengan memberikan perbaikan-perbaikan fasilitas umum dan pelayanan bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat turut merasakan manfaatnya (Handayani & Erinoss, 2020). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber pendapatan asli daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Nur'ainy, dkk., 2013). Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 79 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari 1) Hasil pajak daerah, 2) Hasil retribusi daerah, 3) Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dengan demikian, PAD merupakan pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan kebijakan-kebijakan yang berlaku bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi. Penelitian ini PAD diukur dengan melihat besarnya realisasi PAD dibandingkan total pendapatan daerah dalam laporan Realisasi APBD kabupaten/kota.

2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa (Tahar & Zakhiya, 2011). Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara (Suarjana, et al., 2019). Perekonomian dianggap mengalami

pertumbuhan jika seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya (Gaghana, dkk., 2018). Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Dengan kata lain perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi regional, digunakanlah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dimana PDRB dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sistem perekonomian di suatu wilayah atau daerah dalam kurun waktu tertentu. Sehingga PDRB merupakan suatu ukuran untuk melihat aktivitas perekonomian suatu daerah. Secara teori, PDRB tidak dapat dipisahkan dari Produk Domestik Bruto (PDB) baik dari konsep, definisi, metodologi, cakupan dan sumber datanya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseragaman konsep, definisi dan metoda yang dipakai di seluruh Indonesia.

2.2.5 Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Siregar & Pratiwi, 2017). Tingkat kemandirian keuangan daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada umumnya ditunjukkan oleh variabel-variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), Rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak untuk Daerah (BHPBP) terhadap TPD, dan Rasio Sumbangan Bantuan Daerah (SBD) terhadap TPD (Handayani & Erinos, 2020). Untuk melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya di bidang keuangan, diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan urusan bila didanai sepenuhnya oleh PAD dan Bagi Hasil Daerah (Kustianingsih & Kahar, 2018).

Tingkat kemandirian daerah ini, diukur dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Daerah dalam Laporan Realisasi APBD. Tujuan pengukuran kemandirian keuangan daerah mencerminkan suatu bentuk pemerintahan daerah apakah dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Menurut Handayani & Erinos (2020), rasio

kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumberdana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah.

2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Pengukuran kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besaran sumber pendapatan asli daerah karena pendapatan ini menggambarkan bagaimana keadaan potensi riil suatu daerah (Gaghana, dkk., 2018; Suarjana, et al., 2019). Keuangan pemerintah daerah yang bergantung dengan keuangan pemerintah pusat menyebabkan rendahnya kemandirian keuangan daerah. Handayani & Erinoss (2020) memberikan pandangan bahwa besaran pendapatan yang diperoleh langsung daerah akan berdampak pada tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Konsisten dengan penelitian Kustianingsih & Kahar (2018); Nur'ainy, dkk, (2013); Suarjana, et al. (2019) menemukan kemandirian keuangan daerah dipengaruhi secara positif oleh pendapatan asli daerah.

2.3.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Keberhasilan otonomi daerah diukur dari seberapa besar porsi sumbangan masyarakat lokal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika PDRB meningkat, maka hal ini akan mengindikasikan akan mendorong peningkatan PAD (Handayani & Erinoss, 2020). Diyakini bahwa terdapat korelasi antara pertumbuhan ekonomi daerah dengan kemandirian keuangan daerah (APBD) dari pajak dan retribusi daerah. Sehingga diasumsikan jika belanja modal untuk pelayanan publik meningkat maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahun berikutnya (Gaghana, dkk., 2018; Suarjana, et al., 2019). Konsisten dengan penelitian Kustianingsih & Kahar (2018); Nur'ainy, dkk, (2013); Suarjana, et al. (2019) menemukan kemandirian keuangan daerah dipengaruhi secara positif oleh pertumbuhan ekonomi.

2.4 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah sekaligus tujuan penelitian. Berikut hipotesis penelitiannya:

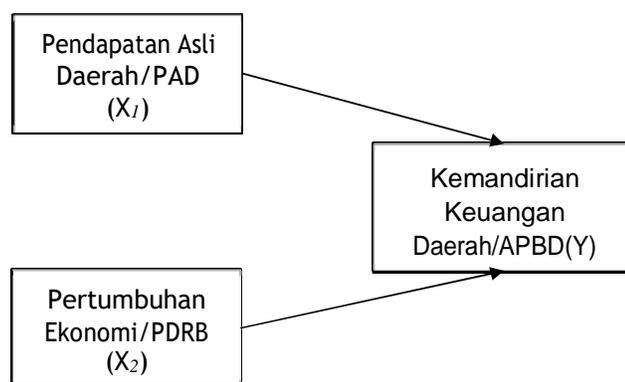
H₁ : Terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah (APBD) pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017- 2019

H₂ : Terdapat pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemandirian keuangan daerah (APBD) pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017- 2019.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 2.1 berikut adalah hasil visualisasi untuk mendapatkan hubungan logis antar variabel yang ada dalam penelitian ini. Terdapat 2 variabel yang mengarah pada variabel kemandirian keuangan daerah (APBD) pemerintah kabupaten/kota sebagai variabel independen, yang diwakili oleh garis lurus menandakan adanya pengaruh dan membentuk hipotesis dalam penelitian ini. Sedangkan variabel pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi adalah variabel dependen.

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual



Sumber: Diolah oleh penulis (2021)